

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Baiquni, M., & Susilawardani (2002). *Pembangunan Yang Tidak berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.
- Hamid, E. S, et. al. (2005). *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. Yogyakarta: UII Press.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu - ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sumaryadi, N. (2010) *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suranto. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. (D. Mutiarin, & A. Zaenudin , Eds.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie. I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan: Edisi Revisi Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syaukani., Afan. G., Ryaas. R. (2002). *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarosa, S. (2012). *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.
- Sigit, S. (1999). *Pengantar Metodologi Penelitian: Sosial - Bisnis - Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

### Jurnal:

- Agustiawan, H. (2014). Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. *Jurnal Kebijakan Publik* 5(1): 111 - 114.

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* 1(1).
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Redoks* 1(1): 34 - 40.
- Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Citra Lekha* 15(1): 19 - 32.
- Jati, W. R. (2012). Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik. *Jurnal Politik: Ilmu Politik*. 3(2)
- Mansyah, N. (2013). Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga. *Jurnal Administrasi Negara*. 1 (3).
- Musianto. L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 4(2): 123 - 136.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. 5(9): 1 - 8.
- Saepudin, A. (2011). Kebijakan Pemerintah Daerah dan Instrumen Pendukungnya dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia Era Otonomi Daerah. *Jurnal Paradigma* 15(2): 1 - 11.
- Somantri. G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*. 9(2): 57 - 65.
- Sujatmiko, B. (2012). Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Socioscienta. Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial* 4(1): 31 - 40
- Syahaddina, N. G. (2011). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda. *Risalah Hukum* 7(2): 130 - 150.
- Thendry, S. (2016). Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengaturan USaha Pertambangan di Era otonomi Daerah. *Jurnal Lex Et Societatis* IV(4): 45 - 53.
- Yudhistira, Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningir Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 76 - 84.

### **Skripsi / Tesis / Disertasi**

- Amelia, R. (2012). Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Illegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Hidayat, R. (2014). Ideologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolaka Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Jaya. T. (2012). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Illegal Mining di Kabupaten Ketapang. *Tesis*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Sinaga, N. (2010). Disain Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pasca Tambang Batubara Berkelanjutan. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Wibisono, B. (2008). Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral yang Berkelanjutan. *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wusada, R. D. (2012). Implementasi Kebijakan Pelarangan Perkembangan Di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul: Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekan Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. *Tesis*. Magister Ilmu Lingkungan. Semarang

### **Buku Terbitan Lembaga**

- PT. Dazya Ina Mandiri (DIM). 2012. Laporan Akhir KLHS RPJMD Provinsi Bangka Belitung. 104. INDO. 1 MES 4 - 1/123/098. Jakarta

### **Undang - Undang**

- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **Website**

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2011). Kebijakan Umum Sektor Tambang. <http://dpekepri.org/files/media/file/sdmineral/Kebijakan%20Mineral%20dan%20Batubara%202011.pdf>. 4 Oktober 2016 (10.00)

Herman, D. Z . (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. [http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin\\_pdf\\_file/Bul%20Vol%201%20no.%202%20thn%202006/6.WPR-2006\\_pak%20danny%20z%20herman\\_.pdf](http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%201%20no.%202%20thn%202006/6.WPR-2006_pak%20danny%20z%20herman_.pdf). 26 Oktober 2016 (17.23)

<http://belitung.tribunnews.com/2016/04/05/tambang-timah-tak-ada-izin-polisi-masih-toleransi> diakses pada tanggal 12 oktober 2016: 15.30 WIB

<http://belitung.tribunnews.com/2016/10/11/woow-65-persen-das-di-bangka-belitung-sudah-rusak-dan-tercemar-karena-tambang-ilegal> diakses pada tanggal 12 oktober 2016: 15.38 WIB

<http://belitung.tribunnews.com/2016/10/10/tambang-ilegal-jarah-hutan-lindung-di-belitung-polisi-lima-tersangka-pemilik-alat-berat-sakit> diakses pada tanggal 12 oktober 2016: 15.45 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/02/dirut-pt-timah-itu-penambangan-ilegal> diakses pada tanggal 12 oktober 2016: 16.00 WIB

<http://belitung.tribunnews.com/2015/12/31/pendapatan-asli-daerah-beltim-masih-didominasi-sektor-pertambangan>

## **Document**

Belitung dalam Angka 2016

Potret Belitung: Negeri Laskar Pelangi Tahun 2013

Renstra Dinas Pertambangan dan Energi

RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2018